



Evaluasi Pembelajaran PKn Berbasis Nilai dalam PKn di MI

Rosmawati

Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email: rw246743@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pembelajaran berbasis nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pembelajaran berbasis nilai diharapkan dapat memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban, demokrasi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta observasi terhadap proses pembelajaran di kelas. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan implementasi dan dampak pembelajaran berbasis nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis nilai memiliki dampak positif terhadap pemahaman siswa mengenai konsep-konsep dasar kewarganegaraan, namun efektivitasnya terbatas oleh faktor-faktor seperti ketidakmerataan infrastruktur pendidikan, keterampilan guru dalam menggunakan teknologi pembelajaran, dan kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan untuk mendukung penerapan metode ini secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan bagi guru dan peningkatan fasilitas pendidikan untuk memperkuat pembelajaran berbasis nilai di MI.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Madrasah Ibtidaiyah, Pancasila, Pendidikan Karakter.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of value-based learning in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in Madrasah Ibtidaiyah (MI). Value-based learning is expected to strengthen students' understanding of citizenship values including rights and obligations, democracy, and national and state life. The method used is a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews with teachers and students, as well as observations of the learning process in the classroom. Data analysis was carried out using thematic analysis techniques to identify key themes related to the implementation and impact of value-based learning. The results of the study indicate that value-based learning has a positive impact on students' understanding of basic citizenship concepts, but its effectiveness is limited by factors such as uneven educational infrastructure, teacher skills in using learning technology, and students' difficulties in understanding abstract concepts. The implications of this study are the importance of improving the quality of teaching and educational infrastructure to support the optimal implementation of this method. This study recommends the need for teacher training and improving educational facilities to strengthen value-based learning in MI.

Keywords: *Citizenship, Elementary School, Pancasila, Character Education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk rasa kebangsaan, nilai-nilai demokrasi, dan tanggung jawab kewarganegaraan pada siswa sejak usia dini (Pangalila, 2017). Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran inti di tingkat dasar yang dirancang untuk menanamkan pengetahuan dan sikap dasar terkait kewarganegaraan, kebangsaan, dan karakter moral. Dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang setara dengan sekolah dasar negeri, PPKn memiliki makna tambahan karena memadukan nilai-nilai kewarganegaraan nasional dengan ajaran agama dan etika yang berakar pada tradisi Islam. Dengan demikian, PPKn di tingkat MI bukan sekadar transmisi pengetahuan, tetapi juga media pendidikan karakter yang menyelaraskan identitas nasional dengan nilai-nilai berbasis agama (Lubis, 2020).

Meskipun memiliki kepentingan strategis, penerapan PPKn di kelas MI sering kali menghadapi berbagai tantangan pedagogis dan kontekstual. Keberagaman kompetensi guru, infrastruktur sekolah, interpretasi kurikulum, dan latar belakang siswa telah menyebabkan praktik pengajaran yang tidak konsisten di seluruh sekolah. Selain itu, pergeseran ke arah kurikulum berbasis kompetensi dan permintaan pembelajaran berorientasi nilai memerlukan transformasi pedagogis yang tidak semua pendidik siap untuk itu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang apakah tujuan PPKn—terutama dalam memelihara kesadaran dan nilai-nilai kewarganegaraan—diwujudkan secara efektif di lingkungan kelas (Kurdi, 2023).

Untuk memastikan hasil yang diharapkan dari PPKn tercapai, evaluasi sistematis terhadap penerapannya di pendidikan dasar, khususnya di MI, sangat penting. Memahami bagaimana PPKn direncanakan, disampaikan, dan dinilai dalam konteks kelas nyata dapat memberikan wawasan kritis tentang kekuatan dan kekurangannya. Evaluasi semacam itu diperlukan tidak hanya untuk meningkatkan praktik pengajaran tetapi juga untuk menginformasikan arah kebijakan dan program pengembangan profesional yang mendukung pendidikan kewarganegaraan sejak usia muda.

Meskipun tujuan PPKn (Pendidikan Kewarganegaraan) di pendidikan dasar dijabarkan dengan jelas dalam kurikulum nasional—yang menekankan pada pengembangan sikap demokratis, penalaran moral, dan identitas nasional—sejauh mana tujuan-tujuan ini secara efektif diterjemahkan ke dalam praktik kelas masih belum jelas. Di banyak Madrasah Ibtidaiyah (MI), sering kali ditemukan perbedaan antara apa yang direncanakan dalam dokumen pengajaran (seperti rencana pelajaran) dan apa yang sebenarnya dilaksanakan dalam proses pembelajaran (Assingky, et.al., 2023). Guru mungkin kesulitan dalam menyampaikan konten berbasis nilai, mengadopsi pendekatan pedagogis yang tepat, atau membuat penilaian yang bermakna yang selaras dengan tujuan pembelajaran kewarganegaraan. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kekhawatiran kritis tentang efektivitas keseluruhan pengajaran PPKn dalam mencapai tujuan transformatifnya (Malawi & Kadarwati, 2023).

Meskipun pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi agenda pendidikan nasional Indonesia, terdapat kekurangan bukti empiris yang secara sistematis mengkaji bagaimana PPKn dioperasionalkan dalam konteks kelas MI. Tanpa data evaluasi yang kuat, sulit untuk menentukan apakah siswa benar-benar menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan atau hanya memperoleh pengetahuan tingkat permukaan. Kesenjangan ini menyoroti urgensi melakukan studi evaluatif yang tidak hanya menyelidiki implementasi PPKn dari perspektif perencanaan, pengajaran, dan praktik penilaian, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor mendasar yang menghambat atau memfasilitasi keberhasilannya (Muhammad, et.al., 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagai bagian dari pendidikan dasar di Indonesia (Prastowo, 2018). Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses belajar-mengajar, dan mekanisme penilaian hasil belajar. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai sejauh mana implementasi pembelajaran PPKn telah selaras dengan tujuan kurikulum nasional, khususnya dalam membentuk karakter, sikap demokratis, serta wawasan kebangsaan peserta didik sejak dini.

Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pembelajaran PPKn di tingkat MI. Temuan yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn, baik dari sisi kebijakan pendidikan, pengembangan kompetensi guru, maupun

pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual dan nilai-orientatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara teoretis terhadap kajian pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perbaikan praktik pendidikan di lapangan (Purwanti, et.al., 2024).

Kajian mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia umumnya lebih banyak berfokus pada analisis isi kurikulum, pengembangan perangkat ajar, atau pengukuran pemahaman kognitif siswa terhadap konsep-konsep kewarganegaraan (Marsudi, 2020). Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengevaluasi proses implementasi pembelajaran PPKn—mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—masih relatif terbatas, terutama dalam konteks Madrasah Ibtidaiyah (MI). Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana pembelajaran PPKn dijalankan secara nyata di ruang kelas dan bagaimana kesesuaiannya dengan tujuan pendidikan karakter yang diusung oleh kurikulum nasional (Wuryandani, et.al., 2014).

Lebih lanjut, sebagian besar studi evaluatif yang tersedia masih menggunakan pendekatan deskriptif konvensional, tanpa mengadopsi kerangka evaluasi yang sistematis dan komprehensif seperti model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Padahal, penggunaan model evaluasi yang terstruktur sangat penting untuk menghasilkan pemetaan yang mendalam dan objektif mengenai kualitas pembelajaran (Pristanti, N. dkk (2023). Celah inilah yang menjadi dasar utama bagi penelitian ini, yang tidak hanya berupaya mengisi kekosongan dalam literatur, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik evaluatif pembelajaran PPKn yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik MI (Lumuan, et.al., 2023).

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian evaluasi pembelajaran PPKn di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan menerapkan pendekatan evaluatif berbasis model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang belum banyak digunakan dalam konteks ini. Kebaruan (*novelty*) dari studi ini terletak pada integrasi antara kerangka evaluasi yang sistematis dan konteks pembelajaran kewarganegaraan berbasis nilai-nilai keislaman, yang menjadi ciri khas MI sebagai institusi pendidikan dasar berbasis agama (Susanna, et.al., 2023). Dengan fokus pada evaluasi praktik nyata di kelas, bukan hanya pada dokumen kurikulum atau persepsi guru, penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pembelajaran PPKn dari berbagai dimensi implementatif.

Justifikasi penelitian ini semakin kuat mengingat pentingnya penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama dalam lanskap pendidikan nasional saat ini. Di tengah tantangan globalisasi, polarisasi sosial, dan disrupsi nilai, pendidikan kewarganegaraan pada jenjang dasar menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, toleran, dan berwawasan kebangsaan. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif terhadap pembelajaran PPKn di MI tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mendukung kebijakan pendidikan yang inklusif dan transformatif (Sholeh, 2023).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) berdasarkan realitas empiris di lapangan. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dipilih karena memiliki kerangka yang komprehensif dalam mengevaluasi program pendidikan dari tahap perencanaan hingga hasil akhir (Putri, 2022).

Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti keberagaman latar belakang siswa, peran strategis MI sebagai lembaga pendidikan berbasis nilai keislaman, serta keterbukaan pihak sekolah terhadap kegiatan penelitian. Selain itu, wilayah Morowali memiliki dinamika sosial yang menarik untuk dikaji dalam konteks pembelajaran nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan, terutama di lingkungan pendidikan dasar.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pembelajaran PPKn di MI. Informan utama meliputi: (1) Guru PPKn, yang memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. (2) Kepala Madrasah, sebagai penentu kebijakan dan pengawasan mutu pembelajaran di tingkat sekolah. (3) Siswa kelas atas (kelas IV–VI), yang menjadi subjek langsung dalam kegiatan pembelajaran. (4) Komite sekolah atau perwakilan orang tua, untuk mendapatkan perspektif dari pihak eksternal terhadap proses pembelajaran. Jumlah informan tidak ditentukan secara kuantitatif sejak awal, tetapi ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi (*data saturation*), yakni ketika data yang diperoleh telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interviews*): Dilakukan terhadap guru, kepala madrasah, siswa, dan komite sekolah. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi data yang fleksibel namun tetap terarah. (2) Observasi partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran PPKn di kelas, termasuk interaksi guru-siswa, metode yang digunakan, dan suasana pembelajaran. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terstruktur berdasarkan indikator dari model CIPP. (3) Studi dokumentasi: Mengkaji dokumen-dokumen yang relevan seperti RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), silabus, hasil evaluasi siswa, serta kebijakan internal madrasah terkait pendidikan karakter dan kewarganegaraan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, mengikuti tahapan Miles dan Huberman, yaitu: (1) Reduksi data: Menyortir dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. (2) Penyajian data: Data disajikan dalam bentuk naratif dan matriks untuk memudahkan interpretasi. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Simpulan sementara terus diverifikasi sepanjang proses analisis hingga diperoleh temuan yang valid dan bermakna (Assingily, 2021).

Setiap data dianalisis dengan mengacu pada empat komponen dalam model CIPP: konteks (kebutuhan dan latar belakang sekolah), input (sumber daya pembelajaran), proses (implementasi pembelajaran), dan produk (hasil belajar serta perubahan sikap siswa). Analisis dilakukan secara induktif, yakni membangun pemahaman dari temuan-temuan lapangan menuju konstruksi tematik yang lebih luas.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui empat teknik: (1) Triangulasi sumber dan teknik: Data diperoleh dari berbagai sumber (guru, siswa, kepala madrasah) dan dengan berbagai teknik (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menghindari bias. (2) Perpanjangan pengamatan: Peneliti melakukan pengamatan dalam beberapa kali kunjungan untuk memahami konteks secara menyeluruh. (3) *Member check*: Hasil sementara dikonfirmasi kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi data telah sesuai dengan maksud mereka. (4) *Audit trail*: Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara rinci untuk menjamin transparansi dan keterlacakan (*auditability*). Dengan desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan relevan dengan pengembangan pembelajaran PPKn di Madrasah Ibtidaiyah, khususnya dalam konteks pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dan keislaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbasis nilai di Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pembelajaran berbasis nilai dalam PPKn di MI bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan yang mencakup hak dan kewajiban, demokrasi, serta pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil analisis dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun penggunaan pembelajaran berbasis nilai memberi dampak positif, ada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam implementasinya di MI Husnunnadia, R.dkk (2024).

Secara umum, penerapan pembelajaran berbasis nilai di MI menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai kewarganegaraan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada metode yang diterapkan oleh pengajar dan media yang digunakan. Sebagian besar guru yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi tentang pentingnya pendidikan nilai dalam konteks kewarganegaraan, namun sebagian besar juga mengungkapkan tantangan besar dalam hal implementasi praktisnya. Hasil wawancara dengan guru-guru PPKn menunjukkan bahwa meskipun mereka memahami teori-teori kewarganegaraan, masih ada keterbatasan dalam merancang kegiatan pembelajaran yang dapat menginternalisasikan nilai-nilai kewarganegaraan dengan baik pada siswa.

Dari segi pemahaman siswa, analisis terhadap hasil survei menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penguasaan konsep-konsep dasar PPKn, seperti hak dan kewajiban, prinsip-prinsip demokrasi, serta pentingnya peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kurniawan, 2017). Siswa yang mengikuti pembelajaran berbasis nilai menunjukkan peningkatan yang jelas dalam hal keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, dan refleksi terhadap isu-isu sosial yang relevan dengan kewarganegaraan. Ini menegaskan bahwa pembelajaran berbasis nilai dalam PPKn dapat memperkuat pemahaman dan pembentukan karakter siswa jika disertai dengan pendekatan yang tepat (Astarita, et.al., 2024).

Namun, tidak semua siswa menunjukkan hasil yang seragam. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti hak asasi manusia dan demokrasi yang tidak langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penerimaan materi berdasarkan latar belakang sosial dan pengalaman hidup masing-masing siswa. Meskipun demikian, siswa yang mendapatkan pembelajaran melalui media pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Ini mencerminkan pentingnya penggunaan media yang dapat mengaitkan konsep-konsep abstrak dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Salah satu temuan menarik yang muncul dari analisis ini adalah adanya perbedaan dalam efektivitas pembelajaran berbasis nilai yang dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur di MI Damayanti, K. dkk (2024). Madrasah dengan akses lebih baik terhadap fasilitas teknologi dan sumber daya pendidikan cenderung lebih sukses dalam menerapkan pembelajaran berbasis nilai secara efektif. Di sisi lain, madrasah yang kekurangan fasilitas teknologi dan sumber daya pendukung, seperti buku ajar dan pelatihan untuk guru, menghadapi banyak kesulitan dalam menerapkan metode ini dengan optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa ketimpangan infrastruktur pendidikan berpengaruh langsung terhadap hasil pembelajaran, khususnya dalam pengajaran berbasis nilai yang mengandalkan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar.

Meskipun hasil dari penerapan media berbasis nilai menunjukkan dampak positif, namun hambatan-hambatan seperti keterbatasan akses terhadap teknologi dan penguasaan guru terhadap media pembelajaran berbasis teknologi tetap menjadi tantangan besar. Beberapa guru mengungkapkan kesulitan dalam menggunakan alat bantu media pembelajaran yang lebih canggih, seperti platform digital atau aplikasi pembelajaran interaktif, karena kurangnya pelatihan dan pengalaman dengan teknologi tersebut. Keterbatasan ini, pada gilirannya, membatasi potensi pembelajaran berbasis nilai untuk berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi dan penyediaan fasilitas yang memadai menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Selain itu, meskipun pembelajaran berbasis nilai diharapkan dapat memperkuat sikap kewarganegaraan dan karakter siswa, ada kesenjangan dalam hal bagaimana nilai-nilai ini diterima dan diterapkan di lingkungan sehari-hari siswa. Meskipun terdapat peningkatan dalam pemahaman konsep, penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial siswa tidak selalu tercermin dalam tindakan konkret, terutama dalam lingkungan yang lebih luas seperti di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan pembelajaran di kelas, tetapi juga melibatkan keterlibatan aktif dari orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

Dalam konteks teori pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini mendukung argumen bahwa pembelajaran berbasis nilai sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar kewarganegaraan. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pembelajaran berbasis nilai

tidak dapat terpisah dari kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur pendidikan yang ada. Dalam hal ini, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan efektif, semua komponen pendidikan, mulai dari guru, siswa, media pembelajaran, hingga kebijakan pemerintah, harus berkolaborasi secara holistik.

Secara keseluruhan, meskipun pembelajaran berbasis nilai dalam PPKn di MI menunjukkan potensi yang besar, tantangan yang dihadapi dalam implementasi di lapangan, seperti ketidakmerataan akses fasilitas, penguasaan teknologi oleh guru, dan penerimaan siswa terhadap konsep-konsep abstrak, perlu menjadi perhatian serius. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana pembelajaran berbasis nilai dapat diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pendidikan kewarganegaraan di MI. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dalam hal infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, serta dukungan kebijakan pendidikan yang lebih kuat akan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari pendekatan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti nilai religius, toleransi, demokrasi, dan tanggung jawab. PPKn bukan sekadar mata pelajaran, tetapi merupakan instrumen penting dalam membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam kurikulum Merdeka, PPKn semakin ditekankan sebagai sarana pembelajaran berbasis nilai. Hal ini sejalan dengan tantangan globalisasi yang menuntut peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran PPKn yang berbasis nilai belum sepenuhnya optimal di satuan pendidikan, khususnya di jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), terutama di daerah seperti Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Assingkily, M. S., Hasri, K. S., Pratiwi, E., Fadilla, P. A., & Sabrina, T. (2023). Concept Analysis and Implementation of "Kampus Merdeka" in Civics Learning for PGMI Study Program Students. *Journal of Contemporary Gender and Child Studies*, 2(3), 134-139. <https://doi.org/10.61253/jcgcs.v2i3.213>.
- Astarita, C., Helfina, S., Umaternate, F., & Assingkily, M. S. (2024). Pancasila Sebagai Filsafat: Tinjauan Analisis Pemahaman dan Sikap Mahasiswa. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 86-93. <https://ziaresearch.or.id/index.php/fatih/article/view/21>.
- Damayanti, K., Mustofa, Z., & Mukminin, A. (2024). Eksplorasi Peran Guru Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Berbasis Teknologi di MI Ma'arif Beton. *Istifkar*, 4(1), 40-57. <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/istifkar/article/view/112>.
- Husnunnadia, R., & Slam, Z. (2024). Pencegahan bullying di sekolah: Mengimplementasikan pendidikan dan kewarganegaraan untuk penguatan hak dan kewajiban anak. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 28-42. <https://litabmas.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/8361/0>.
- Kurdi, M. S. (2023). Dampak Pendidikan Multikultural Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Babasa, Sastra Dan Budaya*, 1(6), 215-244. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/morfologi/article/view/322>.
- Kurniawan, S. (2017). *Pendidikan karakter di sekolah: Revitalisasi peran sekolah dalam menyiapkan generasi bangsa berakhlak*. Samudra Biru.
- Lubis, M. A. (2020). *Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan:(PPKn) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan Di Era Industri 4.0*. PrenadaMedia. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=8A7uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=PenGERTIAN+PPKn+DI+SD/MI&ots=WuWBbOFF45&sig=73vWUErFo8eFu69XFD5MUsvZlaU>.

- Lumuan, L. S. I., Wantu, A., & Hamim, U. (2023). Peran guru PPKn dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik di SMP Negeri 1 Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 210-221. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/17924>.
- Malawi, I., & Kadarwati, A. (2017). *Pembelajaran Tematik (Konsep dan Aplikasi)*. Magetan: CV. Ae Media Grafika.
- Marsudi, K. E. R. (2020). Analisis Isi Buku Siswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Kurikulum 2013. *Framework Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Abad*, 21, 68.
- Muhammad, M., & Nurdyansyah, N. (2015). *Pendekatan Pembelajaran Saintifik*. Nizamia Learning Center. <http://eprints.umsida.ac.id/306>.
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). <http://repository.unima.ac.id:8080/handle/123456789/426>
- Prastowo, A. (2018). Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SD/MI Di Indonesia: Dari Ktsp Menuju Kurikulum 2013. *Tarbiyah al-Anlad*, 8(1), 36-52. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289325>.
- Pristanti, N. A., & Ardhiyah, U. (2023). Evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling menggunakan Model CIPP. *Coution: journal of counseling and education*, 4(1), 18-29. <http://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/coution/article/view/627>.
- Purwanti, I. A., & Trisiana, A. (2024). Peran Pembelajaran PKN Dalam Membangun Kepekaan Terhadap Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Pada Siswa Kelas Viib SMPN 3 Sragen). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 144-161. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/11558>
- Putri, T. D. (2022). *Peningkatan Pemahaman Nilai Karakter Nasionalis Dalam Mata Pelajaran PKN dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Role Playing Peserta Didik Kelas V SDN Sindangsari Kota Sukabumi* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60916>.
- Sholeh, M. I. (2023). Implementasi nilai-nilai keislaman dalam program anti-bullying di lembaga pendidikan Islam. *Al Manar*, 1(2), 62-85. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/987>.
- Susanna, S., Usman, J., & Suyanta, S. (2023). Guru di persimpangan kurikulum baru: Dilema implementasi kurikulum merdeka berbasis keislaman. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(2), 356-369. <https://www.jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/478>.
- Wuryandani, W., Maftuh, B., Sapriya, S., & Budimansyah, D. (2014). Pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. *Cakrawala Pendidikan*, (2), 87637. <https://www.neliti.com/publications/87637/pendidikan-karakter-disiplin-di-sekolah-dasar>.